KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1052/DJU/SK.TI1.1/VI/2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) TINGKAT PUSAT DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 911/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Tingkat Pusat Dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025 sudah tidak sesuai seiring adanya perpindahan tugas anggota Satgas SIPP Tahun 2025

b. bahwa di seluruh 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja Lingkungan Peradilan Umum sudah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pelaksanaan administrasi perkara;

c. bahwa seiring adanya pembaruan yang terus dilakukan untuk penyempurnaan SIPP, disamping adanya permasalahan teknis maupun non teknis dalam penerapan SIPP pada satuan kerja maka dibutuhkan suatu Satuan Tugas untuk menghimpun masukan dan permasalahan di satuan kerja, serta mengkoordinasikan penyelesaian dan informasi antara tim pengembang di pusat dengan pengelola di satuan kerja;

d. Bahwa memperhatikan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

d. bahwa memperhatikan butir a, b, dan c tersebut maka dipandang perlu untuk memperbaharui Satuan Tugas SIPP Tingkat Pusat dan Satuan Tugas SIPP Tingkat Banding sesuai usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing;

e. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu utuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota satgas SIPP;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Perkara Pidana;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1052/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) TINGKAT PUSAT DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025**

Kesatu...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 911/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Tingkat Pusat Dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025

KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat dan Tingkat Banding pada Pengadilan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat mempunyai tugas :

1. Kesekretariatan :
   a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sistem Informasi Perkara (SATGAS SIPP);
   b. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
   c. Menghimpun *review* atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
   d. Melakukan publikasi terhadap *Frequenty Asked Question* (*FAQ*) pada media yang telah ditentukan;
   e. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
2. Divisi Kajian :
   a. Melakukan *review* atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
   b. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
   c. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
   d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

e. Membuat laporan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

e. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

3. Divisi Teknis Aplikasi :
   a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
   b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
   c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
   d. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
   e. Membuat dan mengembangkan tools/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk mendukung register elektronik;
   f. Melakukan Koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding mempunyai tugas:

1. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) baik di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
3. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya;

4.Melakukan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

4. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Bersama-sama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan bimbingan teknis ataupun sosialisasi terkait penerapan SIPP dan aplikasi terkait lainnya.
6. Melakukan rapat koordinasi Satgas SIPP Pengadilan Tingkat Banding dengan Satgas SIPP seluruh Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya minimal 1 kali dalam setahun;
7. Membuat laporan implementasi, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
8. Melakukan koordinasi dengan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Badan Peradilan Umum;
9. Memonitor kesiapan Pengadilan Negeri untuk penerapan register elektronik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1052/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
TANGGAL : 10 Juni 2025

DAFTAR NAMA

SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

(SATGAS SIPP) TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN	POSISI DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	H. Bambang Myanto, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembina
2.	Zahlisa Vitalita, S.H., M.H	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Ketua Satgas
3.	Budi Setioko, S.H., M.H.	Kasubdit Statistik dan Dokumentasi	Sekretaris Satgas
KESEKRETARIATAN			
4.	Lies Khadijah, S.H., M.H.	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring	Koordinator
5.	Aditya Widyartadi, S.Kom	Kepala Seksi Statistik	Wakil Koordinator
6.	Misra Dewita, S.H., M.H	Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum	Anggota
7.	Reni Kartini, S.H	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	Anggota
8.	Marthinalova Noll, S.Kom	Penata Layanan Operasional - Seksi Bimbingan I	Anggota
9.	Chintya Amanda, S.H.	Analis Perkara Peradilan - Seksi Sarana Kerja Pengadilan	Anggota
10.	Wahyu, A.Md	Teknisi Sarana dan Prasarana - Seksi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
11.	Pratiwi Rope, S.E	Arsiparis - Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum	Anggota
DIVISI KAJIAN			
11.	Muhammad Damis, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Koordinator
12.	Dr. Albertina Ho, S.H.M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta	Wakil Koordinator I
13.	Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan	Wakil Koordinator II

-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

14.	Erwin Djong, S.H., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak	Anggota
16	Dr. Suprapti, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	Anggota
17.	Achmad Yusak, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Anggota
18.	Achmad Guntur, S.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota
19.	Mustamin, SH., MH.	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Anggota
20	Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Anggota
21.	Candra, S.H.	Kasubdit Tata Kelola	Anggota
22.	Achmad Basyari, S.E.	Kepala Seksi Bimbingan I	Anggota
DIVISI TEKNIS APLIKASI			
23.	Jhon Hendriansyah, S.H.	Panitera Muda Khusus PHI Pengadilan Negeri Jambi	Koordinator
24.	Roby Hidayat, S.T	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tinggi Riau	Anggota
25.	Fransisco Palang Ama, S.T.	Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang	Anggota
26.	Aris Susilo, S.T.	Sekretaris Pengadilan Negeri Madiun	Anggota
27.	H. Dona Panambayan, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota
28.	Marisa Eka Putra, S.T., M.Eng	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang	Anggota
29.	Oktein Josepus Susak, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi	Anggota
30.	Yenny Viky Effendy, S.T., M.Eng	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Yogyakarta	Anggota
31.	Imam Maxudi, S.Kom	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	Anggota
32.	Ita Masyita, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
33.	Adityo Nugroho, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

34.	Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom, S.H, M.H	Kepala Seksi Tata Persidangan	Anggota
35.	Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T.	Kepala Seksi Bimbingan II	Anggota
36.	Faizal A. Djau, S.SI	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Gorontalo	Anggota
37.	Zeno Dani Kuncoro, ST.	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Anggota
38.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
39.	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
40.	Adven Edo Prasetya, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
41.	Komang Ary Tebuana, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Mataram	Anggota
42.	Didik Irfan Setiawan, Amd.Kom.	Pengolah Data dan Informasi Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Mojokerto	Anggota
43.	Puji Wiyono, S.Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Klaten	Anggota
44.	Yuli Harianto, S.Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1052/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
TANGGAL : 10 JUNI 2025

DAFTAR NAMA

SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

PENGADILAN TINGGI (SATGAS SIPP PT) TAHUN 2025

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. Makaroda Hafat, SH., M.Hum.	196305301988031003	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2.	Irwan Efendi, S.H., M.Hum.	196505041992121001	
3.	Sigit Pramono Ginting, A.Md.T.	199812282020121003	
4.	Heri, A.Md	199006242020121004	
5.	Syamsul Qamar, S.H., M.H.	196104221986121001	Pengadilan Tinggi Medan
6.	Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.	196812251992121001	
7.	Candra Arris Saputra, S.Kom	199103242015031003	
8.	Muhammad Yassir Rangkuti, A.Md	199002192019031007	
9.	Masrizal, S.H., M.H.	196111111988031004	Pengadilan Tinggi Padang
10.	Jon Effredi, S.H., M.H	196404021985031005	
11.	Reflison Agusto, S.Kom	198808262015031002	
12.	Nabilah Jasmine, S.Kom.	199602042020122007	
13.	Desbenneri Sinaga, S.H., M.H	196112051988031002	Pengadilan Tinggi Riau
14.	Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H	196208221992121001	
15.	Fadhliamin, S.Si	199102062015031003	
16.	Melgisaputra Dwi Nanda, S.Kom., M.Kom	199303102020121005	
17.	Sapta Diharja, S.H., M.Hum	196207071992121001	Pengadilan Tinggi Jambi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Abu Hanifah, S.H., M.H.	196704291996031001	Pengadilan Tinggi Jambi
19.	Riri Indriati Purba, S.Kom	199006172015032002	
20.	Aryono Digdo Prabowo, S.T.	199103092015031003	
21.	R.A Suharni, S.H., M.H	196102121986122001	Pengadilan Tinggi Palembang
22.	Putut Tri Sunarko, S.H., M.H	196803181992121001	
23.	Muhammad Fadhli, A.Md	199410152020121006	
24.	Tarisa Aprilliani, S.H	200009052024052001	
25.	Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H.	196606181992121001	Pengadilan Tinggi Bengkulu
26.	Duta Baskara, S.H., M.H.	196404211991031004	
27.	Agief Muftahid, S.Kom	199702182020121006	
28.	Dwipraja Kumara Zuma, A.Md	199110302022031004	
29.	Antonius Simbolon, S.H., M.H.	196202081988031002	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
30.	Nunsuhaini, S.H., M.Hum	196508071985032002	
31.	Eko Dwi Wibowo, S.Kom., M.T.I.	199102092015031005	
32.	Isnani Kurnia Putri, S.Kom	199108202015032004	
33.	Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.	196305251992122001	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
34.	Sri Suharini, S.H., M.H	196612171992122001	
35.	Irhansyah, S.Kom	198004172009121003	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
36.	Erni Novianti, A.Md.A.B.	199611192022032015	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
37.	Karel Tuppu, S.H., M.H.	195904071985031005	Pengadilan Tinggi Jakarta
38.	Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.	196101151985121001	
39.	Destian Bimantoro, S.Kom	198512132011011007	
40.	Anjani, S.Si	199202242019032015	
41.	Sudarwin, S.H., M.H.	196111031988031002	Pengadilan Tinggi Bandung
42.	Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si	196202251988031003	
43.	Devira Wiena Pramintya, S.Kom	199512152020122014	
44.	Indra Rizky Firmansyah, A.Md.T.	199108202020121003	
45.	Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.	196005031985031005	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
46.	Dedeh Suryanti, S.H., M.H.	196006241987022001	
47.	Erlangga Narendra Perdhana, S.Kom	199106072020121003	
48.	Hanung Marvieanto Nugroho, A.Md.	199203242020121003	
49.	Harini, S.H., M.H.	195904041985031002	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
50.	Mochamad Badi` Romadloni, A.Md	199502132019031007	
51.	Erwin Fajar Saputra	-	
52.	Suhartanto, S.H., M.H.	196412081989031003	Pengadilan Tinggi Surabaya
53.	Titet Fauzi Rachmawan, S.S.	198505232014041001	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
54.	M. Arifin, A.Md.	199403102019031002	Pengadilan Tinggi Surabaya
55.	Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.	196305311988031003	Pengadilan Tinggi Banten
56.	Inrawaldi, S.H., M.H.	196210211988031001	
57.	Bobby Ertanto, S.H.	198704252006041002	
58.	Pribadi Hutomo Putro, S.Kom	-	
59.	Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.	196312051988031004	Pengadilan Tinggi Denpasar
60.	Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H	196404211992122001	
61.	I Gede Kartika Aryasa, S.T	197604212009041002	
62.	I Ketut Suharsana, S.Kom, M.Kom	198201162009121001	
63.	Gede Ariawan, S.H. M.H.	196107201988031006	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
64.	Siti Hamidah, S.H., M.H.	196602281992122001	
65.	Ichwan Setiawan, S.T.	198705262011011006	
66.	Satria Buana, A.Md	198403272011011011	
67.	Ojo Sumarna, S.H.,.M.H.	196506041992121003	Pengadilan Tinggi Kupang
68.	Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.	196701201993032003	
69.	Feby Mariane Malelak, S.Kom	198402202009042006	
70.	Rian Fedrianto, S.Kom.	199001092020121003	
71.	Lutfi, S.H.	196002081980031002	Pengadilan Tinggi Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
72.	Pransis Sinaga, S.H., M.H.	196302241992121001	Pengadilan Tinggi Pontianak
73.	ST Nina Maulia, S.T.	198611192009122005	
74.	Weni Kurniasari, S.IP., M.M.	198703272011012019	
75.	Didik Wuryanto, S.H., M.Hum	196109181988031007	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
76.	Heru Budyanto, S.H., M.H.	196308141992121003	
77.	Yogi Nugraha Putra, S.Kom.	199409182019031009	
78.	Bangga Chrysto Tarigan, A.Md.	199604272019031001	
79.	Eni Sri Rahayu, S.H., M.H	196205241982032002	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
80.	Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.	196711291992121001	
81.	Deffi Qurroti A`Yunin Rofik, A.Md	199609242020122003	
82.	Okta Pilopa, A.Md.	199210272020121002	
83.	Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.	196305121988031002	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
84.	Eddy Soeprayitno S Putra, S.H., M.H.	196305031992121001	
85.	Nadya Syfa Paulina Lontoh, A.Md.A.B.	199707152022032023	
86.	Soni Prasetiyo, S.Kom	-	
87.	Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.	196706291992121001	Pengadilan Tinggi Manado
88.	Paluko Hutagalung, S.H., M.H	196007231992121001	
89.	Retzi Yosia Lewu, S.T, M.Kom	198203092009122002	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
90.	Pelita Santi, S.T	199802192020122003	Pengadilan Tinggi Manado
91.	Toto Ridarto, S.H, M.H	196705161992121001	Pengadilan Tinggi Palu
92.	Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.	196709031992121001	
93.	Rahmat Safrin Domut, S.SI, S.T	198410302009121004	
94.	Andy Yuliansyah, A.Md	199007292020121004	
95.	Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.	196210251986031004	Pengadilan Tinggi Makassar
96.	Acice Sendong, S.H., M.H.	196008201992122001	
97.	Nur Alqadri, A.Md.	198905252019031005	
98.	Yuli Harianto	-	
99.	Muhamad Sirad, S.H., M.H.	196211051989031005	Pengadilan Tinggi Kendari
100.	Imam Supriyadi, S.H., M.H.	196401141991031001	
101.	Gilang Erlambang, A.Md	198906272019031003	
102.	Rista Nur Aini, A.Md.T	199708052020122005	
103.	Agung Purbantoro, S.H., M.H	196410151992121001	Pengadilan Tinggi Gorontalo
104.	Bambang Sucipto, S.H., M.H	196505291992121001	
105.	Heriyanto Dali, S.Kom	-	
106.	P. Cokro Hendro Mukti, S.H	196509201992031004	Pengadilan Tinggi Ambon
107.	Leba Max Nandoko Rohi, S.H	196803031992121003	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
108.	Mochamad Abdul Ghofur, A.Md., A.B	199705162020121002	Pengadilan Tinggi Ambon
109.	Andi Agung, A.Md	199702042020121002	
110.	Sudira S.H., M.H	196408141992121001	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
111.	Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.	196111071985031009	
112.	Syahruddin, S.Kom.	198710192011011003	
113.	Bayu indrianto, S.H	199412092022031004	
114.	Sigit Pangudianto, S.H., M.H.	196508051992121001	Pengadilan Tinggi Jayapura
115.	Tornado Edmawan, S.H., M.H.	196310231996031001	
116.	Aditya Putra Setia Sinaga, A.Md.	199604192019041001	
117.	Said Aqiel Siroj, S.H.	199909162024051001	
118.	Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum	196508121992031004	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
119.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	196701271992121001	
120.	Muhammad Alim Abadi, S.H	198611192012121001	
121.	Muhammad Rizki Agustria Pengestu, A.Md.T.	199805042020121004	
122.	Bagus Irawan, S.H., M.H	196308261988031003	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
123.	Priyanto, S.H., M.Hum	196102041992121001	
124.	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom	198603292015031001	
125.	Santo Barri Gultom, S.H.	199305302024051001	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NO.	N A M A	NIP	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
126.	Joko Saptono, S.H., M.H.	196808311992121001	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
127.	Dr. Gutiarso, S.H., M.H.	196605081992121001	
128.	Wawan, S.Kom	-	
129.	Tri Mardiyanto	-	
130.	Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.	196611161992121001	Pengadilan Tinggi Papua Barat
131.	Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.	196208241992121001	
132.	Leonard Simarmata, S.H	197406291994031003	
133.	Eka Rani R. Manuputty, S.T	198804032009122003	

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.